

**PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI  
TERHADAP PENGUNGKAPAN *INTELLECTUAL CAPITAL***

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



**OLEH:**

**SARIFAH AINI  
1303507/2013**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

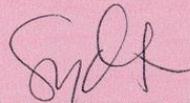
**PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI  
TERHADAP PENGUNGKAPAN *INTELLECTUAL CAPITAL***

**Nama** : Sarifah Aini  
**NIM/TM** : 1303507 / 2013  
**Jurusan** : Akuntansi  
**Keahlian** : Akuntansi  
**Fakultas** : Ekonomi

Padang, 14 Februari 2018

Disetujui oleh:

**Pembimbing I**



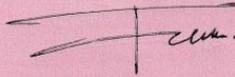
**Sany Dwita, SE., M.Si., Ph.D., Ak., CA**  
NIP. 19800103 200212 2 001

**Pembimbing II**



**Vita Vitria Sari, SE, M.Si**  
NIP. 19870515 201012 2 009

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi**



**Fefri Indra Arza, S.E, M.Sc, Ak**  
NIP. 19730213 199903 1 003

**HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Ujian  
Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi*

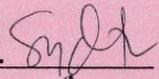
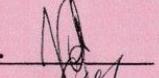
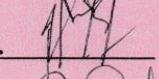
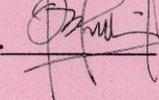
*Universitas Negeri Padang*

**PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI  
TERHADAP PENGUNGKAPAN *INTELLECTUAL CAPITAL***

**Nama** : Sarifah Aini  
**NIM/TM** : 1303507 / 2013  
**Jurusan** : Akuntansi  
**Keahlian** : Akuntansi  
**Fakultas** : Ekonomi

Padang, 14 Februari 2018

**Tim Penguji**

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Sany Dwita, S.E., M.Si., Ph.D., Ak., CA	1. 
2.	Sekretaris	Vita Vitria Sari, SE, M.Si	2. 
3.	Anggota	Nayang Helmayunita, SE, M.Sc	3. 
4.	Anggota	Halmawati, SE, M.Si	4. 

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sarifah Aini  
NIM/Thn. Masuk : 1303507/2013  
Tempat/Tgl Lahir : Talang Dasun/ 25 Agustus 1995  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Keuangan  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Jl. Ngurah Rai No. 10, Polonia, Air Tawar Timur, Padang  
No. Hp/Telepon : 082389430305  
Judul Skripsi : Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris dan Direksi Terhadap Pengungkapan *Intellectual Capital*

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis atau skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis atau skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima Sanksi Akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis atau skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Februari 2018

Yang Menyatakan

  
SARIFAH AINI  
NIM 2013/1303507

**Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris dan Direksi terhadap Pengungkapan  
*Intellectual Capital***

**Sarifah Aini**

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang

***Abstract***

*The purpose of this study is to examine the relationship between board of commissioner and board of management characteristics to intellectual capital disclosure (ICDI). The intellectual capital disclosure measurement in this study used the index developed by Haji and Nazli (2012). The data were collected from 32 banks listed in Indonesia Stock Exchange period 2014-2016. Sampling method using purposive sampling. This study find no significant relations between intellectual capital disclosure and board of commissioner and board of management characteristics.*

**Keyword :** *intellectual capital disclosure, board of commissioner, board of management, banking industry*

**Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara karakteristik dewan komisaris dan direksi terhadap *intellectual capital disclosure* (ICDI). Pengukuran pengungkapan modal intelektual dalam penelitian ini menggunakan indeks yang dikembangkan oleh Haji dan Nazli (2012). Data tersebut dikumpulkan dari 32 bank yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Studi ini menemukan tidak ada hubungan yang signifikan antara pengungkapan *intellectual capital* dengan karakteristik dewan komisaris dan dewan manajemen atau direksi.

**Kata Kunci:** *intellectual capital disclosure, board of commissioner, board of management, banking industry*

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris dan Direksi Terhadap Pengungkapan *Intellectual Capital*”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program studi S-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Sany Dwita, SE, M.Si, Ph.D, Ak, CA selaku pembimbing I dan Ibu Vita Fitria Sari, SE, M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan transfer ilmu kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Nayang Helmayunita, SE, M.Sc dan ibu Halmawati, SE, M.Si selaku penguji yang telah memberi banyak saran dan perbaikan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak dan Bapak Henri Agustin S.E, M.Sc, Ak selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

5. Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak selaku dosen Penasehat Akademik (PA).
6. Pegawai perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
7. Staf dosen serta karyawan / karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
8. Ayahanda tercinta Ismail, Ibunda tercinta Nurma, kakak tersayang Leni Marlinda, Dodi Afrizal, Novriantos dan Fitri Diana yang telah memberikan perhatian, semangat, do'a, dorongan dan pengorbanan baik secara moril maupun materil hingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.
9. Sahabat tercinta penulis "pacah talua" Dewi, Hisna, Reni, Ayu dan Silfia yang telah setia menemani dan memberikan semangat hingga skripsi ini selesai.
10. Para senior dan junior di se-lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang memberikan semangat belajar, do'a, dan motivasi penulis untuk berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman Prodi Akuntansi angkatan 2013 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang serta rekan-rekan Prodi Ekonomi Pembangunan, Manajemen, dan Pendidikan Ekonomi yang sama-sama berjuang atas motivasi, saran, serta dukungan yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
12. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang bapak/ibu dan rekan - rekan berikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Padang, Febuari 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
 <b>BAB II KAJIAN TEORI, HIPOTESIS DAN KERANGKA KONSEPTUAL</b>	
A. Kajian Teori	
1. <i>Agency theory</i> .....	12
2. <i>Signaling Theory</i> .....	14
3. <i>Intellectual Capital</i> .....	15
a. Pengertian <i>intellectual capital</i> .....	15
b. Komponen <i>intellectual capital</i> .....	16
c. Pengungkapan <i>intellectual capital</i> .....	19
4. <i>Corporate Governance</i>	
a. Pengertian <i>corporate governance</i> .....	21
b. <i>Corporate governance</i> di Indonesia.....	23
c. Asas <i>corporate governance</i> .....	24
5. Dewan Komisaris .....	26
6. Direksi .....	27

7. Variabel Kontrol.....	29
B. Penelitian Terdahulu .....	30
C. Hubungan antara Variabel dan Hipotesis.....	33
D. Kerangka Konseptual .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Populasi dan Sampel .....	41
C. Jenis Data dan Sumber Data.....	43
D. Teknik Pengumpulan Data .....	44
E. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel .....	44
F. Teknik Analisis Data.....	49
G. Definisi Operasional .....	55
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Perusahaan Perbankan di Indonesia .....	57
B. Deskripsi Variabel Penelitian.....	58
C. Statistik Deskriptif.....	82
D. Analisis Induktif	
1. Analisis model regresi panel .....	84
2. Uji Asumsi Klasik .....	85
3. Model Regresi Panel .....	88
E. Uji Model .....	89
F. Pembahasan.....	93
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	99
B. Keterbatasan.....	100
C. Saran.....	101

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Komponen <i>Intellectual Capital</i> .....	18
2. Kriteria Pemilihan Sampel Penelitian .....	42
3. Daftar Sampel Perusahaan .....	43
4. Klasifikasi Nilai d .....	53
5. Indeks <i>Intellectual Capital Disclosure</i> Perusahaan Sampel .....	60
6. Data Ukuran Dewan Komisaris Perusahaan Sampel .....	64
7. Data Dewan Komisaris Independen Perusahaan Sampel.....	66
8. Data Proporsi Dewan Komisaris Wanita Perusahaan Sampel .....	69
9. Data Proporsi Direksi Perusahaan Sampel.....	71
10. Data Rapat Direksi Perusahaan Sampel.....	73
11. Data <i>Listing Age</i> pada Perusahaan Sampel .....	75
12. Data Ukuran Perusahaan pada Perusahaan Sampel .....	77
13. Data Profitabilitas pada Perusahaan Sampel.....	81
14. Hasil Statistik Deskriptif Perusahaan Perbankan.....	83
15. Hasil <i>Chow Test</i> atau <i>Likelyhood Test</i> .....	84
16. Hasil <i>Hausman Test</i> atau <i>Likelyhood Test</i> .....	85
17. Hasil Uji Heterokedastisitas .....	86
18. Hasil Uji Autokorelasi.....	87
19. Hasil Uji Multikolinerasitas .....	87
20. Hasil Regresi Panel .....	88
21. Ringkasan Hasil Penelitian .....	92

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Struktur Dewan Komisaris dan Direksi .....	24
2. Kerangka Konseptual .....	40
3. Hasil Uji Normalitas.....	85

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1. Daftar Perusahaan Perbankan .....	105
2. Variabel Penelitian .....	106
3. Estimasi Model Regresi Panel .....	116
4. Uji Asumsi Klasik .....	117
5. Hasil Estimasi Regresi Panel .....	119

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam era ekonomi berbasis pengetahuan, ketidakpuasan atas praktik pelaporan keuangan tradisional termasuk ketidakmampuan untuk memberikan informasi yang lebih kepada para pemangku kepentingan perusahaan semakin meningkat (Boesso & Kumar, 2007 dalam Haji, A.A & Ghazali, 2013). Ketidakpuasan ini menyebabkan permintaan jenis informasi yang berbeda (Abeysekera & Guthrie, 2005). Pelaporan keuangan tradisional tidak secara khusus mempertimbangkan pengungkapan informasi *intellectual capital* yang menggambarkan persentase signifikan dari total nilai perusahaan (Guthrie *et al.*, 2006). Sebagai hasilnya, banyak perusahaan memenuhi tuntutan para pemangku kepentingan untuk melengkapi pelaporan keuangan tradisional dengan informasi non-keuangan termasuk informasi *intellectual capital* (Abeysekera & Guthrie, 2005).

*Intellectual capital* adalah sebagai kepemilikan dari pengetahuan dan pengalaman, pengetahuan profesional dan keahlian, hubungan yang baik, dan kapasitas penguasaan teknologi yang dapat menciptakan keunggulan kompetitif bagi organisasi atau perusahaan (CIMA, 2001). *Intellectual capital* menarik perhatian para akademisi maupun praktisi secara luas. Bagi perusahaan, *intellectual capital* adalah sumber keunggulan kompetitif perusahaan (Drucker, dalam Yan 2017).

Dalam era informasi, nilai yang besar tidak lagi berasal dari aset berwujud perusahaan tetapi berasal dari *intellectual capital*. Untuk lebih

bersaing di pasar *modern*, banyak perusahaan meningkatkan jumlah investasi pada *intellectual capital* untuk mempromosikan pertumbuhan perusahaannya (Dzinkowski, dalam Yan 2017). Menurut Li *et al.* (2008) jika diterapkan dengan baik, *intellectual capital* akan menciptakan keunggulan daya saing karena mengandung pengetahuan, keterampilan, kapasitas teknologi, dan hubungan baik yang dibutuhkan perusahaan agar dapat terus bertahan.

Taylor & Associates (2011) menunjukkan bahwa pengungkapan *intellectual capital* termasuk dalam 10 peringkat informasi teratas yang diperlukan oleh para pemangku kepentingan. Menurut teori keagenan, pengungkapan *Intellectual capital* dapat mengurangi masalah asimetri informasi dan meredakan konflik keagenan sehingga meningkatkan nilai perusahaan (Singh & Zahn, 2008; Amran & Davi, 2011). Dimana masalah asimetri informasi timbul karena adanya pemisahan kepemilikan antara pihak pemilik (*principal*) dan pihak manajemen (*agent*) (Ruth *et al.*, 2011), sedangkan konflik keagenan timbul karena pihak manajemen memilih untuk memaksimalkan kepentingan pribadi dan mengorbankan manfaat pemegang saham (Yan, 2017).

Beberapa temuan empiris menunjukkan bahwa pengungkapan *intellectual capital* perusahaan yang tercatat di BEI masih rendah. Penelitian yang dilakukan Suhardjanto & Wardhani (2010) menghasilkan bahwa hanya 34% yang telah melakukan pengungkapan *intellectual capital*, sementara itu hasil penelitian Uzliawati (2015) menunjukkan peningkatan yaitu sebanyak 52% perusahaan telah melakukan pengungkapan *intellectual capital*.

Persentase peningkatan pengungkapan *intellectual capital* tersebut masih di bawah 60% sedangkan informasi modal intelektual penting bagi perusahaan dan investor dimana Price Waterhouse Coopers (dalam Santoso, 2012) mengidentifikasi bahwa pengungkapan *intellectual capital* merupakan strategi penting bagi perusahaan.

Goh dan Lim (2004) menyatakan bahwa informasi *intellectual capital* adalah salah satu informasi yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan perusahaan, khususnya investor. Pengungkapan *intellectual capital* bagi investor merupakan informasi yang berguna untuk membantu mengurangi ketidakpastian mengenai prospek masa depan perusahaan dan membantu memberikan penilaian yang lebih akurat bagi perusahaan (Bukh, 2003). Luasnya *intellectual capital disclosure* akan memberikan kesan positif terhadap investor (Gutherie *et al.*, 2006) karena *intellectual capital* mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang handal, tingginya ide kreatif perusahaan, memiliki hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan, dan struktur organisasi yang kokoh.

Di Indonesia fenomena *intellectual capital* mulai berkembang sejak munculnya PSAK No. 19 (revisi 2010) tentang aset tidak berwujud, namun tidak disebutkan mengenai *intellectual capital* secara rinci. Menurut PSAK No. 19 (revisi 2010) aset tidak berwujud didefinisikan sebagai aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tanpa wujud fisik. Aset tidak berwujud ini dibagi dalam 2 kelompok, yaitu aset tidak berwujud yang eksistensinya dibatasi oleh ketentuan tertentu, seperti hak paten, hak cipta, hak sewa,

*franchise* terbatas, dan aset tidak berwujud yang tidak dapat dipastikan masa berakhirnya, seperti merk dagang, proses dan formula rahasia, dan *goodwill*.

Pengungkapan *intellectual capital* dalam laporan tahunan perusahaan masih bersifat sukarela (*voluntary*). Belum ada peraturan yang mewajibkan perusahaan-perusahaan publik untuk mengungkapkan informasi *intellectual capital* dalam laporan tahunannya sehingga perusahaan bisa memilih untuk tidak mengungkapkan modal intelektual yang dimilikinya. Dalam penelitian yang meneliti tentang faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan *intellectual capital* seperti penelitian Li *et al.* (2008), Cerbioni & Parbonetti (2007), Hidalgo *et al.* (2011), dan Yan (2017) menunjukkan hasil bahwa adanya hubungan yang kuat antara *corporate governance* terhadap pengungkapan *intellectual capital*.

Krisis keuangan yang terjadi tahun 1997/1998 di Asia mengakibatkan kondisi perekonomian di beberapa negara menjadi terpuruk, termasuk Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh McKinsey & Co (2002) dalam Pakaryaningsih (2006), penelitian *Credit Lyonnais Securities Asia* (CLSA) dalam Setianto (2002), dan penelitian *Indonesian Institute of Corporate Governance* (IICG) dalam Kusumastuti (2007) memberikan satu indikasi yang menyatakan bahwa penyebab terjadinya krisis ekonomi tahun 1997 adalah karena buruknya *corporate governance*. Penelitian-penelitian tersebut menyatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang buruk dalam penerapan *corporate governance*.

Setelah krisis keuangan tersebut, dibentuklah Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) pada tahun 1999. Kemudian pada tahun 2004, KNKCG diubah menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). KNKG telah menerbitkan Pedoman Nasional *Good Corporate Governance* (Pedoman Nasional GCG) pertama kali pada tahun 1999, yang kemudian direvisi pada tahun 2001 dan 2006. Penerapan *corporate governance* membentuk perusahaan untuk lebih transparan, bertanggung jawab, independen, dan meningkatkan akuntabilitas perusahaan (KNKG, 2006).

Menurut Syakhroza (2003) *corporate governance* adalah suatu sistem yang dipakai “*Board*” untuk mengarahkan dan mengendalikan serta mengawasi pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis dan produktif dengan prinsip – prinsip *transparan, accountable, responsible, independent, dan fairness* (TARIF) dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Syahroza (2003) juga menjelaskan bahwa *board* atau dewan adalah pucuk pimpinan suatu organisasi yang bertanggungjawab untuk mengarahkan dan mengendalikan serta mengawasi pemakaian sumber daya agar selaras dengan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Struktur dewan (*board*) dalam sebuah perusahaan ada dua yaitu *one tier system* dan *two tier system*. Dalam sistem *one-tier* tidak terdapat pemisahan peran antara dewan komisaris dan direksi, sehingga hanya ada satu dewan yaitu dewan komisaris. Sedangkan dalam sistem *two-tier* terdapat pemisahan peran antara dewan komisaris sebagai pengawas dan direksi

sebagai eksekutif perusahaan. Perusahaan-perusahaan di Indonesia mengikuti model yang kedua yaitu *two-tier system* karena Indonesia merupakan salah satu negara bekas jajahan Eropa yaitu Belanda, dimana setiap perusahaan memiliki dua dewan dalam struktur organisasinya yaitu dewan komisaris dan direksi (Lukviarman, 2004).

Dewan komisaris dan direksi merupakan bagian dari atribut tata kelola perusahaan yang secara umum memainkan peran penting dalam tatakelola perusahaan. Syahroza (2003) menyatakan bahwa dewan komisaris dan direksi adalah yang bertanggungjawab dan memiliki otoritas penuh dalam membuat keputusan tentang bagaimana melakukan pengarahannya, pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan sumber daya sesuai dengan tujuan perusahaan.

Lukviarman (2004) menyatakan bahwa dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang bertugas sebagai pengawas dan penasihat direksi. Direksi merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab dalam mengelola perusahaan (FCGI, 2001). Holland (2006) juga menyatakan bahwa direksi memiliki peran aktif dalam proses pengungkapan terkait dengan penyediaan informasi modal intelektual.

Karakteristik dari dewan komisaris dan direksi yang peneliti gunakan yaitu ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, dewan komisaris wanita, ukuran direksi dan jumlah rapat direksi. Ukuran dewan komisaris merupakan salah satu karakteristik dari dewan komisaris yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah pengungkapan *intellectual capital*. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.04/2014 jumlah

dewan komisaris paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris. Yan (2017) berpendapat bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris maka akan semakin baik pengawasan yang dapat dilakukan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.04/2014 menyatakan bahwa dalam dewan komisaris harus ada dewan komisaris independen paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Komisaris independen merupakan komisaris yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan. Komisaris independen diharapkan dapat menekan perusahaan untuk terlibat dalam pengungkapan tambahan seperti pengungkapan *intellectual capital* (Haniffa & Cooke, dalam Haji, A.A & Mohd Ghazali, 2013).

Selain dewan komisaris dan komisaris independen, proporsi dewan komisaris wanita termasuk salah satu karakteristik dari dewan komisaris yang peneliti teliti. Dewan komisaris wanita diharapkan mampu meningkatkan nilai perusahaan, salah satunya dengan memperlus pengungkapan *intellectual capital*. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kusumastuti *et al.* (2007) bahwa keberadaan dewan komisaris wanita mampu mendorong perusahaan untuk meningkatkan pengungkapan atas *intellectual capital*, karena sifat wanita yang sangat berhati-hati dan teliti dalam mengambil keputusan dibandingkan pria. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Carter *et al.* (2003) bahwa dengan adanya keberagaman dewan dipercaya dapat mempengaruhi nilai perusahaan, karena dapat memberikan alternatif penyelesaian masalah yang beragam daripada anggota dewan yang homogen.

Karakteristik direksi yang diharapkan mampu meningkatkan jumlah pengungkapan *intellectual capital* salah satunya yaitu ukuran direksi. Hidalgo *et al.* (2011) menyatakan bahwa lebih banyak direksi dalam struktur dewan perusahaan bisa mengkompensasi kekurangan individu dalam pengambilan keputusan. Menurut teori agensi, besaran ukuran direksi akan mampu mengurangi masalah koordinasi dan meningkatkan kemampuan dewan untuk melakukan tindakan strategis dalam pengambilan keputusan.

Haji, A.A & Mohd Ghazali (2013) berpendapat bahwa salah satu cara untuk membangun hubungan yang sehat dengan prinsipal adalah dengan menunjukkan komitmen anggota dewan melalui frekuensi sering mengadakan rapat direksi dalam membahas masalah perusahaan. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.04/2014 disebutkan bahwa direksi wajib mengadakan rapat direksi paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Menurut Khanchai (dalam Haji, A.A & Mohd Ghazali, 2013) frekuensi rapat direksi dapat menjadi bukti bahwa anggota direksi berkomitmen dan aktif dalam mengelola perusahaan.

Beberapa penelitian juga telah membahas mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap *intellectual capital disclosure*. Diantaranya Allegrini & Greco (2011) menemukan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *voluntary disclosure*, seperti *intellectual capital disclosure*. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Cerbioni & Parbonetti (2007) serta Abeysekera (2010) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *intellectual capital disclosure*.

Independensi dewan komisaris dalam penelitian Cerbioni & Parbonetti (2007) dan Haji, A.A & Mohd Ghazali (2013) menunjukkan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori agensi dimana dewan komisaris independen mampu meningkatkan keefektifan peran dewan komisaris. Tetapi hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian Nugroho (2012) dan Arifah (2012) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh positif independensi dewan terhadap pengungkapan *intellectual capital*.

Penelitian Putri, I.N & Chairiri (2016) menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dewan komisaris wanita terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Sedangkan penelitian Uzliawati (2015) menunjukkan hasil yang berbeda, bahwa dewan komisaris wanita tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Besaran direksi dalam penelitian Haji, A.A & Mohd Ghazali (2013) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh besaran direksi terhadap pengungkapan *intellectual capital*, namun dalam penelitian Hidalgo *et al.* (2011) dan Yan (2017) menunjukkan adanya pengaruh positif ukuran direksi terhadap pengungkapan *intellectual capital*.

Berdasarkan latar belakang diatas diketahui bahwa hasil penelitian sebelumnya masih beragam dan pengungkapan *intellectual capital* dalam laporan tahunan perusahaan masih bersifat sukarela, padahal pengungkapan *intellectual capital* termasuk dalam sepuluh peringkat informasi teratas yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan, maka penulis tertarik

mengangkat penelitian ini dengan judul “**Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris dan Direksi Terhadap Pengungkapan *Intellectual Capital* ”**”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka pertanyaan penelitian yang muncul dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan *intellectual capital*?
2. Bagaimana pengaruh proporsi komisaris independen terhadap pengungkapan *intellectual capital*?
3. Bagaimana pengaruh dewan komisaris wanita terhadap pengungkapan *intellectual capital*?
4. Bagaimana pengaruh ukuran direksi terhadap pengungkapan *intellectual capital*?
5. Bagaimana pengaruh rapat direksi terhadap pengungkapan *intellectual capital*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah

1. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh ukuran komisaris terhadap pengungkapan *intellectual capital*.
2. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh proporsi komisaris independen terhadap pengungkapan *intellectual capital*.
3. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh dewan komisaris wanita terhadap pengungkapan *intellectual capital*.

4. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh ukuran direksi terhadap pengungkapan *intellectual capital*.
5. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh rapat direksi terhadap pengungkapan *intellectual capital*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak pemakai laporan keuangan, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian di masa depan yang berhubungan dengan *intellectual capital*.
2. Bagi investor, dapat menilai prospek perusahaan dimasa yang akan datang berdasarkan luas pengungkapan *intellectual capital* perusahaan dan membantu dalam pengambilan keputusan investasi.
3. Bagi pemerintah dan lembaga-lembaga pembuat standar akuntansi, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan standar baru dalam meningkatkan kualitas standar dan peraturan yang sudah ada.
4. Bagi universitas, dapat menambah bahan referensi dan informasi bacaan khususnya bagi yang akan menyusun skripsi.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI, HIPOTESIS, DAN KERANGKA KONSEPTUAL**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan teori keagenan sebagai hubungan keagenan antara principal dan agen. Hubungan tersebut dianggap sebagai kontrak di mana satu orang atau lebih prinsipal melibatkan agen untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka dan melibatkan pendelegasian wewenang untuk membuat keputusan. Dalam kontrak tersebut, agen terikat untuk memberikan jasa kepada prinsipal (Jensen & Meckling, 1976).

*Agency theory* menghubungkan pengungkapan sukarela terhadap tata kelola perusahaan, dimana mekanisme pengendalian tersebut dibuat untuk mengurangi masalah agensi antara pemisahan kepemilikan dan manajemen (Welker, 1995). Konflik yang terjadi antara principal dan agen disebabkan karena adanya asimetri informasi. Asimetri informasi terjadi ketika salah satu pihak dalam suatu hubungan atau lembaga tertentu memiliki keunggulan informasi daripada pihak lain.

Pihak agen (manajemen) perusahaan lebih memahami kondisi internal suatu perusahaan dibandingkan dengan pihak principal (pemilik). Kondisi tersebut akan memicu potensi kecurangan pihak agen untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Salah satu bentuk kecurangan yang dilakukan yaitu menyajikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Sedangkan, pihak prinsipal memiliki keterbatasan

memperoleh informasi secara rinci karena tidak memahami kondisi internal perusahaan. Untuk memperoleh informasi, pihak prinsipal hanya terbatas pada laporan tahunan perusahaan yang disajikan. Dengan demikian, hal tersebut dapat merugikan investor karena memperoleh informasi yang tidak relevan dan akurat.

Hendriksen dan Breda (2001) menyatakan bahwa terdapat 2 permasalahan yang ditimbulkan oleh adanya asimetri informasi, yaitu *adverse selection* dan *moral hazard*. *Adverse selection* terjadi ketika terdapat asimetri informasi sehingga manajer (agen) dapat mengeksploitasi keuntungan dengan pengelolaan informasi yang diberikan kepada prinsipal. Informasi yang tidak lengkap dari manajer (agen) tersebut dapat merugikan prinsipal karena tidak semua keadaan diketahui oleh kedua belah pihak sehingga prinsipal tidak dapat mengamati semua aksi manajer (agen). Asimetri informasi juga menyebabkan terjadinya masalah kekacauan moral (*moral hazard*). *Moral hazard* terjadi ketika manajer (agen) melakukan tindakan tanpa sepengetahuan prinsipal untuk keuntungan pribadinya dan dapat menurunkan kesejahteraan prinsipal.

Pelaksanaan *corporate governance* diperlukan dalam suatu perusahaan karena manajer (agen) cenderung mengambil keputusan berdasarkan kepentingan pribadi dan melalaikan kepentingan pemegang saham. *Corporate governance* merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi pihak yang berkepentingan dan dapat mengubah perilaku manajer

(agen) sehingga dapat menekan kemungkinan terjadinya *moral hazard* oleh manajemen.

Singh dan Zahn (dalam Haji A. A & Mohd Ghazali, 2013) menyatakan bahwa teori keagenan juga menunjukkan bahwa penggunaan pelaporan *intellectual capital* secara sukarela dapat mengurangi masalah asimetri informasi. Selain itu, informasi *intellectual capital* juga dapat meredakan konflik prinsipal dengan agen karena informasi *intellectual capital* akan meningkatkan nilai perusahaan.

## **2. Teori Signaling (*Signaling Theory*)**

An & Davey (2011) menyatakan bahwa teori signaling ini berkaitan dengan bagaimana untuk mengatasi masalah yang timbul dari asimetri informasi dalam pengaturan masalah sosial. Ini menunjukkan bahwa asimetri informasi harus dikurangi jika pihak yang memiliki informasi lebih lanjut dapat mengirim sinyal kepada pihak terkait lainnya. Sebuah sinyal dapat menjadi sebuah struktur atau tindakan yang diamati, yang digunakan untuk menunjukkan karakteristik tersembunyi (kualitas) dari signaler tersebut. Pengiriman sinyal biasanya didasarkan pada asumsi bahwa itu harus menguntungkan untuk *signaler*.

Signaling teori menyatakan bahwa perusahaan dengan kualitas sinyal yang tinggi, keuntungan mereka harus sampai ke pasar. Di satu sisi, sinyal akan membuat investor dan pemangku kepentingan lainnya menilai kembali nilai perusahaan, dan kemudian membuat keputusan yang lebih menguntungkan bagi perusahaan (Whiting & Miller, 2008). Di sisi lain,

mendukung berbagai pemangku kepentingan akan membuat perusahaan mendapatkan lebih banyak investasi, dan karena itu mengurangi biaya meningkatkan modal.

Pengungkapan *intellectual capital* bisa menjadi sarana yang sangat efektif bagi perusahaan untuk mempunyai kualitas sinyal hubungan yang unggul karena *intellectual capital* dapat menambah nilai perusahaan (Whiting & Miller, 2008). Pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan, bisa membawa banyak manfaat bagi perusahaan, seperti meningkatkan citra perusahaan, menarik investor potensial, menurunkan biaya modal, penurunan volatilitas saham, menciptakan pemahaman produk atau jasa, dan yang lebih penting meningkatkan hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan (Singh & Van der Zahn, 2008).

### **3. *Intellectual Capital***

#### **1. Pengertian *Intellectual Capital***

Terdapat berbagai definisi *intellectual capital* yang berbeda dari berbagai literatur yang ada. Definisi *intellectual capital* menurut *The Chartered Institute of Management Accountants* (CIMA) (dalam Li *et al.*, 2008) adalah:

... kepemilikan pengetahuan dan pengalaman, pengetahuan profesional dan *skill*, hubungan-hubungan yang baik, dan kapasitas teknologi, yang mana ketika diterapkan akan memberi keunggulan kompetitif organisasi.

Edvinsson dan Malone (dalam Shiddiq, 2013) mendefinisikan *intellectual capital* sebagai pengetahuan yang tidak terlihat secara fisik yang dapat dikonversi menjadi nilai bagi perusahaan meskipun tidak terlihat dalam laporan keuangan. Selain itu, *intellectual capital* juga didefinisikan secara luas sebagai perbedaan atau selisih antara nilai pasar dan nilai buku perusahaan (Ordonez de Pablos, dalam Haji, A.A & Mohd Ghazali, 2013). Oleh karena itu, *intellectual capital* dapat didefinisikan sebagai semua proses berdasarkan aset tidak berwujud yang mencakup sumber daya perusahaan yang biasanya tidak ditampilkan dalam neraca dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai perusahaan.

## **2. Komponen *Intellectual Capital***

*Intellectual capital* terdiri dari beberapa komponen-komponen yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi perusahaan untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan daya saing perusahaan. Ada banyak pendapat mengenai komponen-komponen *intellectual capital* sehingga muncul kekhawatiran mengenai perbedaan kategorisasi pengungkapan *intellectual capital*. Tampak bahwa klasifikasi yang dikembangkan oleh Sveiby (dalam Haji, A.A & Mohd Ghazali, 2013) mendapat penerimaan universal seperti yang telah dimanfaatkan oleh sejumlah penelitian sebelumnya di negara maju dan negara berkembang.

Saat ini klasifikasi Sveiby (1997) menjadi yang paling umum digunakan dalam literatur pengungkapan *intellectual capital*. Sveiby (1997) membagi *intellectual capital* ke dalam tiga komponen, yaitu:

- 1) Struktur internal (*internal structure*), meliputi struktur organisasi, sistem-sistem manual, dan perangkat lunak.
- 2) Struktur eksternal (*external structure*), meliputi hubungan dengan pelanggan dan pemasok serta merk dan nama perusahaan.
- 3) Kompetensi karyawan (*employee competence*), meliputi pendidikan dan pelatihan bagi para karyawan dan staf perusahaan.

Klasifikasi Sveiby (1997) kemudian dimodifikasi oleh Guthrie & Petty (2000) menjadi modal internal (*internal capital*), modal eksternal (*external capital*), dan modal manusia (*human capital*). Menurut Guthrie *et al.* (2004):

Modal internal (*internal capital*) meliputi sistem, kebijakan, budaya, dan kemampuan organisasi lainnya yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Modal eksternal (*external capital*) mencakup hubungan eksternal dengan orang-orang di luar organisasi, dan modal manusia (*human capital*) mencakup pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan keahlian karyawan.

Modal internal (*internal capital*), modal eksternal (*external capital*), dan modal manusia (*human capital*) merupakan komponen yang saling berkaitan. Oleh karena itu, perusahaan harus memberi

perhatian pada ketiga komponen *intellectual capital* tersebut agar dapat meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan.

Penelitian ini menggunakan indeks pengukuran yang dikembangkan oleh Haji & Nazli (2012). Penggunaan indeks ini didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu: a) Checklist yang digunakan lebih komprehensif dan mencakup tiga kategori *intellectual capital* yaitu modal internal, modal eksternal dan modal manusia, b) Checklist ini sesuai dengan negara peneliti karena checklist ini merupakan pengembangan dari beberapa peneliti yang mempertimbangkan negara-negara berkembang seperti (Guthrie & Petty, 2000; Bontis, 2003; Bozzolan *et al*, 2003; Abeysekera, 2007; Li *et al*, 2008; Yi & Davey, 2010). c) Checklist ini terdiri dari 40 item yaitu 14 item untuk modal manusia atau *human capital*, 9 item untuk modal internal atau *struktual capital*, dan sisanya 17 item untuk modal eksternal atau *relational capital*.

**Tabel 1**  
**Komponen *Intellectual Capital***

<b>Human Capital</b>	<b>Structural Capital</b>	<b>Relation Capital</b>
<b>A. Kompetensi</b> 1. Ketrampilan karyawan. 2. Pendidikan 3. Kualifikasi jurusan 4. Pengetahuan yang berhubungan dengan pekerjaan 5. Berbagi pengalaman 6. Motivasi	<b>A. Modal Intelektual</b> 1. Paten 2. Copyright 3. Merek dagang 4. Budaya perusahaan 5. Filosofi manajemen 6. Sistem informasi 7. Kepemimpinan 8. Inovasi	<b>A. Informasi Merek</b> 1. Merek 2. Pengakuan merek 3. Pengembangan merek 4. Goodwill <b>B. Pelanggan.</b> 5. Informasi yang berkaitan dengan pelanggan 6. Kepuasan pelanggan

<ul style="list-style-type: none"> <li>7. Keahlian karyawan</li> <li>8. Tim ahli</li> <li>9. Spesialis</li> <li>10. Pelatihan</li> <li>11. Keanekaragaman budaya</li> </ul> <p><b>B. Personalia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>12. Sumberdaya manusia</li> <li>13. Kepuasan karyawan</li> <li>14. Retensi karyawan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>9. Penelitian dan pengembangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7. Loyalitas pelanggan</li> <li>8. Apresiasi pelanggan</li> <li>9. Retensi pelanggan</li> <li>10. Pelayanan pelanggan</li> <li>11. Sistem umpan balik pelanggan</li> <li>12. Kepedulian khusus.</li> <li>13. Saluran distribusi</li> <li>14. Penguasaan pasar pelanggan.</li> </ul> <p><b>C. Persekutuan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>15. Kolaborasi bisnis</li> <li>16. Perjanjian lisensi</li> <li>17. Join ventura</li> </ul>
---	--	---

Sumber: Haji dan Nazli (2012)

### 3. Pengungkapan *Intellectual Capital*

Pengungkapan *intellectual capital* adalah suatu laporan yang dikeluarkan oleh perusahaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pemangku kepentingan (Abeysekera, 2007). Pengungkapan *intellectual capital* dalam laporan tahunan tidak dimasukkan dalam neraca walaupun *intellectual capital* diidentifikasi sebagai aset tidak berwujud. Hal ini disebabkan pengungkapan *intellectual capital* sulit untuk diukur dan dikuantifikasikan. PSAK No. 19 (revisi 2010) belum mengatur mengenai identifikasi dan pengukuran *intellectual capital*, sehingga pengungkapan *intellectual capital* di Indonesia masih bersifat sukarela (*voluntary*).

Pengungkapan *intellectual capital* merupakan informasi tambahan yang terdapat pada laporan tahunan perusahaan. Dengan

mengungkapkan informasi *intellectual capital*, perusahaan dapat mengatasi masalah yang ada dalam hubungan keagenan, seperti asimetri informasi. Biaya keagenan akan timbul dari perilaku oportunistik manajer, sehingga perusahaan termotivasi untuk mengungkapkan informasi *intellectual capital* secara sukarela untuk mengurangi biaya keagenan tersebut (Jensen & Meckling, 1976).

Menurut Widjanarko (2006) dalam Nugroho (2012) terdapat lima alasan perusahaan-perusahaan melaporkan *intellectual capital*, yaitu:

- 1) Pelaporan *intellectual capital* dapat membantu organisasi merumuskan strategi bisnis dengan mengidentifikasi dan mengembangkan *intellectual capital* suatu organisasi untuk mendapatkan *competitive advantage*.
- 2) Pelaporan *intellectual capital* dapat membawa pada pengembangan indikator-indikator kunci prestasi perusahaan yang akan membantu mengevaluasi hasil-hasil pencapaian strategis.
- 3) Pelaporan *intellectual capital* dapat membantu mengevaluasi merger dan akuisisi perusahaan, khususnya untuk menentukan harga yang dibayar oleh perusahaan pengakuisis.
- 4) Menggunakan *capital nonfinancial* dapat dihubungkan dengan rencana insentif dan kompetensi perusahaan. Dimana alasan pertama sampai keempat merupakan alasan internal perusahaan.

5) Mengkomunikasikan pada *stakeholder* eksternal tentang *intellectual property* yang dimiliki perusahaan yang merupakan alasan eksternal perusahaan.

Pengungkapan *intellectual capital* menurut teori keagenan menunjukkan bahwa pengungkapan *intellectual capital* bisa mengurangi masalah asimetri informasi sehingga bisa meredakan konflik keagenan dan meningkatkan nilai perusahaan (Singh & Zahn, 2008; An *et al*, 2011). Menurut teori legitimasi, pengungkapan *intellectual capital* berhubungan erat dengan organisasi, dengan tingkat *intellectual capital* yang tinggi perusahaan perlu membuat lebih banyak pengungkapan *intellectual capital* karena perusahaan tidak mampu untuk melegitimasi status atas dasar aktiva tetap tradisional yang diakui sebagai simbol keberhasilan perusahaan (Guthrie *et al.*, 2006). Sedangkan menurut teori signaling pengungkapan *intellectual capital* bisa menjadi sarana yang sangat efektif bagi perusahaan agar untuk mempunyai kualitas sinyal yang unggul karena pentingnya *intellectual capital* untuk penciptaan kekayaan (Whiting & Miller, 2008).

#### **4. Corporate Governance**

##### **a. Pengertian Corporate Governance**

*Corporate governance* adalah suatu sistem atau cara di mana perusahaan dikendalikan untuk arah perusahaan yang bertanggung jawab kepada *stakeholders* (Dahya *et al.*, dalam Haji, A. A & Mohd

Ghazali, 2013). Menurut *Cadbury Committee of United Kingdom* dalam *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), *corporate governance* diartikan sebagai:

Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Selain itu, FCGI juga menjelaskan, bahwa tujuan dari *corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Menurut Solihin (dalam Waryanto, 2010), pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan terhadap berbagai peraturan yang berlaku. Dengan adanya mekanisme pengawasan tersebut, maka diharapkan dapat meminimalkan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh agen sehingga dapat mencegah kerugian di antara kedua belah pihak.

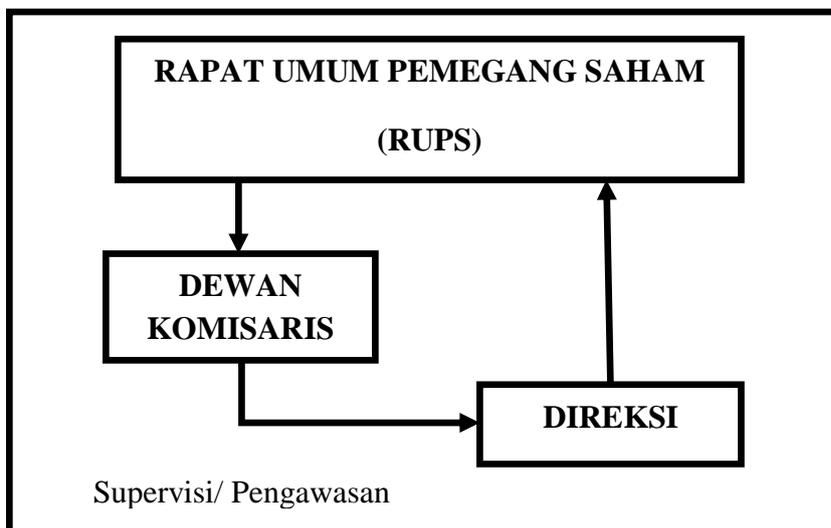
Terdapat praktik *corporate governance* yang berbeda yaitu berasal sistem hukum yang berbeda (FCGI, 2001). Sistem tersebut adalah *one tier system* dari Anglo Saxon dan *two tier system* dari Kontinental Eropa. Negara-negara yang menggunakan *one tier system* adalah

Amerika Serikat, Inggris, Canada, dan Australia. Sedangkan negara-negara yang menggunakan *two tier system* adalah Jerman, Belanda, Denmark, dan Jepang. Indonesia menggunakan *two tier system* dalam struktur dewan perusahaan karena pengaruh sistem hukum Indonesia berasal dari sistem hukum Belanda.

**b. *Corporate Governance* di Indonesia**

Indonesia menganut *two tier system* untuk struktur dewan dalam perusahaan (FCGI). Pada *two tier system* ini, terdapat dua organ perusahaan yaitu direksi dan dewan komisaris. Menurut Undang-undang (UU) nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Hubungan antara direksi dan dewan komisaris dalam *two tier system* di Indonesia dapat dijelaskan pada gambar 1 dibawah ini.

**Gambar 1**  
**Struktur Dewan Komisaris dan Direksi**  
 dalam *Two Tier System* yang diadopsi di Indonesia



Sumber: FCGI, 2001

**c. Asas *Corporate Governance* (GCG)**

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), ada 5 asas *Good Corporate Governance* yaitu:

1) *Transparansi (Transparency)*

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2) Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3) Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4) Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas *good corporate governance* (GCG), perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5) Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

## 5. Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah dewan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada direktur atau direksi. Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.04/2014 bahwa dewan komisaris adalah organ emiten atau perusahaan publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum serta memberi nasihat kepada direksi. Di Indonesia, dewan komisaris ditunjuk oleh RUPS dan di dalam peraturan OJK Nomor 33 /POJK.04/2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik yang dijabarkan mengenai fungsi wewenang dan tanggung jawab dari dewan komisaris. Menurut peraturan OJK Nomor 33 /POJK.04/2014 pada pasal 20 ayat (1) bahwa dewan komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris.

Menurut pedoman umum GCG Indonesia (KNKG, 2006), jumlah anggota dewan komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Menurut Pedoman Umum GCG Indonesia (KNKG, 2006), agar pelaksanaan tugas dewan komisaris dapat berjalan efektif, maka perlu dipenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.

2. Anggota dewan komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.
3. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

Dewan komkisararis bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh direksi agar sesuai dengan peraturan dan kepentingan pemangku kepentingan. Fungsi kontrol yang dilakukan oleh dewan komisaris dapat mengurangi biaya agensi. Dewan komisaris merupakan mekanisme pengendalian internal yang dapat digunakan untuk menyelaraskan perbedaan kepentingan yang terjadi antara pihak agen dengan pihak prinsipal dengan melakukan pengungkapan informasi modal intelektual.

## **6. Direksi**

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014, direksi adalah organ emiten atau perusahaan publik yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan emiten atau perusahaan publik untuk kepentingan emiten atau perusahaan publik, sesuai dengan maksud dan tujuan emiten atau perusahaan publik serta mewakili emiten atau perusahaan publik, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi merupakan

organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab dalam mengelola perusahaan (FCGI, 2001).

Menurut peraturan OJK Nomor 33 /POJK.04/2014 bahwa direksi pada emiten atau perusahaan publik paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota direksi dan 1 (satu) di antara anggota direksi diangkat menjadi direktur utama atau presiden direktur. Pada pasal (3) disebutkan bahwa anggota direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dan anggota direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.

Beberapa persyaratan tentang keanggotaan direksi, yaitu :

- a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
  - 1) tidak pernah dinyatakan pailit;
  - 2) tidak pernah menjadi anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
  - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
  - 4) tidak pernah menjadi anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang selama menjabat:
    - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;

- b) pertanggungjawabannya sebagai anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris kepada RUPS;
- c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan
- e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan emiten atau perusahaan publik.

## 7. Variabel Kontrol

Penelitian ini menggunakan variable kontrol untuk mengendalikan beberapa variable lain. Pertama, *Listing age* dijadikan sebagai variabel kontrol didasarkan pada asumsi bahwa perusahaan-perusahaan yang lebih muda atau baru terdaftar akan memiliki asimetri informasi yang cenderung lebih tinggi (Li *et al*, 2008; Singh & Van der Zahn, 2008). Kedua, profitabilitas menjadi variabel kontrol dengan asumsi bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan akan meningkatkan pengungkapan intellectual capital. Variable ini secara konsisten ditemukan berhubungan dengan pengungkapan *intellectual capital* (Li *et al.*, 2008; 2012). Ketiga, penelitian ini menggunakan ukuran

perusahaan karena perusahaan besar lebih terlihat dan lebih mungkin untuk memenuhi permintaan investor terkait informasi (Li *et al.*, 2008), dan diharapkan ada hubungan positif antara ukuran perusahaan dan tingkat pengungkapan modal intelektual. Variable ini secara konsisten ditemukan berhubungan dengan pengungkapan (Li *et al.*, 2008; Cerbioni & Parbonetti, 2007)

## **B. Penelitian Terdahulu**

Berikut ini adalah penelitian-penelitian terdahulu mengenai atribut *corporate governance* dan pengungkapan *intellectual capital*. Penelitian yang dilakukan oleh Yan (2017) tentang tata kelola perusahaan dan pengungkapan *intellectual capital* di dalam pernyataan CEO. Hasilnya menunjukkan bahwa komposisi dewan dan konsentrasi saham secara signifikan berkorelasi dengan tindakan pengungkapan modal intelektual CEO kecuali ukuran dewan.

Penelitian Cerbioni dan Parbonetti (2007) menguji pengaruh atribut *corporate governance* terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Variabel yang diuji adalah komisaris independen, komposisi dewan, dualitas CEO, struktur dewan dan pengungkapan sukarela *intellectual capital*. Lima puluh empat perusahaan bioteknologi yang terdaftar di negara-negara Eropa tahun 2002-2004 dijadikan sampel penelitian. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela *intellectual capital* sedangkan komposisi dewan, dualitas CEO dan struktur dewan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sukarela *intellectual capital*.

Penelitian Li *et al.* (2008) menguji pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Variabel yang digunakan adalah komposisi dewan, struktur kepemilikan, ukuran komite audit, frekuensi rapat komite audit, dan peran dualitas CEO. Penelitian ini menggunakan sampel 100 perusahaan yang terdaftar di Inggris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua atribut *corporate governance* berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *intellectual capital*, kecuali peran dualitas CEO.

Penelitian Hidalgo *et al.* (2011) menyelidiki pengaruh atribut *corporate governance* dan struktur kepemilikan terhadap tingkat pengungkapan *intellectual capital* dengan menggunakan sampel 100 perusahaan yang terdaftar di Meksiko. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya ukuran direksi yang memiliki pengaruh signifikan positif dengan tingkat pengungkapan *intellectual capital*. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif dengan tingkat pengungkapan *intellectual capital*.

Nugroho (2011) menguji pengaruh struktur *corporate governance* terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Penelitian menggunakan proporsi komisaris independen, konsentrasi saham, ukuran komite audit, jumlah rapat komite audit, auditor eksternal, kepemilikan manajemen dan kepemilikan institusi sebagai variabel independen. Penelitian ini menggunakan sampel 36 perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2008. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara semua faktor *corporate governance* kecuali proporsi komisaris independen, ukuran komite audit, dan auditor eksternal terhadap pengungkapan *intellectual capital*.

Arifah (2012) juga menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris, keindependensian komisaris independen, kesibukan komisaris independen, dan komite audit. Penelitian ini menggunakan sampel 45 perusahaan yang masuk dalam kategori perusahaan IC *intensive* pada tahun 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit merupakan satu-satunya mekanisme *corporate governance* yang berpengaruh secara signifikan pada pengungkapan *intellectual capital*.

Penelitian Uzliawati (2015) menguji pengaruh karakteristik dewan komisaris dan *intellectual capital disclosure* pada perbankan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan karakteristik dewan komisaris (ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris, frekuensi rapat dewan komisaris, latar belakang pendidikan dewan komisaris, keberadaan wanita dalam dewan komisaris) sebagai variabel independen dan *intellectual capital disclosure* sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, dan frekuensi rapat dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure*, sedangkan latar belakang pendidikan dewan komisaris dan dewan komisaris wanita tidak memiliki pengaruh terhadap *intellectual capital disclosure*.

Penelitian Haji, A.A & Mohd Ghazali (2013) menguji pengaruh atribut *corporate governance* terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Penelitian

ini menggunakan atribut *corporate governance* (ukuran perusahaan, komisaris independen, hubungan keluarga di dewan, pertemuan dewan, dan posisi ketua) dan pola struktur kepemilikan (kepemilikan direksi, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan institusi) sebagai variabel independen dan pengungkapan *intellectual capital* sebagai variabel dependen. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa semua atribut *corporate governance* kecuali hubungan keluarga di dewan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Kepemilikan direksi mempunyai pengaruh negatif terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Dan kepemilikan pemerintah mempunyai pengaruh positif signifikan dalam menentukan tingkat pengungkapan *intellectual capital*.

### **C. Hubungan antara Variabel dan Hipotesis**

#### **1. Hubungan ukuran dewan komisaris dengan pengungkapan *intellectual capital*.**

Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota yang ada dalam dewan komisaris. Semakin besar dewan komisaris, maka semakin besar kemungkinan dalam mengurangi kecurangan yang dilakukan oleh direksi. Yan (2017) berpendapat bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris maka akan semakin baik pengawasan yang dapat dilakukan. Hal ini dipertegas dengan pernyataan Hidalgo *et al.* (2011) bahwa ukuran dewan komisaris yang besar bisa menguntungkan karena mereka dapat meningkatkan keahlian dan sumber daya yang ada di dalam perusahaan.

Lukviarman (2004) menyatakan bahwa dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang bertugas sebagai pengawas dan penasihat direksi. Teori agensi menyatakan bahwa asimetri informasi terjadi ketika salah satu pihak dalam suatu hubungan atau lembaga tertentu memiliki keunggulan informasi daripada pihak lain. Semakin banyak jumlah dewan komisaris di dalam sebuah perusahaan, diharapkan dewan komisaris dapat meminimalkan asimetri informasi yang terjadi di perusahaan. Salah satunya dengan memaksimalkan informasi yang akan diungkapkan yaitu mengungkapkan *intellectual capital* yang akan digunakan oleh pemangku kepentingan.

Sejumlah penelitian menemukan bahwa ukuran dewan komisaris mempunyai hubungan positif terhadap pengungkapan *intellectual capital* (Li *et al*, 2008; Haji A.A & Mohd Ghazali, 2013). Allegrini & Greco (2011) juga menemukan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *voluntary disclosure*, seperti *intellectual capital disclosure*. Oleh karena itu, peneliti berharap adanya pengaruh positif ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Berdasarkan kajian teoritis dan empiris, maka hipotesis 1 dalam penelitian ini adalah:

**H1: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *intellectual capital*.**

## 2. Hubungan komisaris independen dengan pengungkapan *intellectual capital*.

Dewan komisaris merupakan suatu badan dalam perusahaan yang anggotanya terdiri dari komisaris independen dan non independen. Dewan komisaris yang independen berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan (Susiana & Herawaty, 2007). Komisaris independen memiliki peran utama untuk memastikan bahwa kepentingan pemegang saham terlindung dengan baik (Fama, dalam Uzliawati, 2015). Dari perspektif pengungkapan, komisaris independen diharapkan dapat menekan perusahaan untuk terlibat dalam pengungkapan *intellectual capital* (Haniffa & Cooke, dalam Haji A.A & Mohd Ghazali, 2013).

Secara teori dan praktek, tujuan adanya komisaris independen adalah sebagai penyeimbang pengambilan keputusan dewan komisaris. Misi komisaris independen adalah mendorong terciptanya iklim yang lebih objektif dan menempatkan kesetaraan (*fairness*) diantara berbagai kepentingan termasuk kepentingan perusahaan dan kepentingan *stakeholders* sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris.

Independensi dewan komisaris dalam penelitian Cerbioni & Parbonetti (2007) dan Haji, A.A & Mohd Ghazali (2013) menunjukkan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori agensi dimana dewan komisaris

independen mampu meningkatkan keefektifan peran dewan komisaris. Oleh karena itu, peneliti berharap adanya pengaruh positif komisaris independen terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Berdasarkan kajian teoritis dan empiris, maka hipotesis 2 dalam penelitian ini adalah:

**H2: Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan *intellectual capital*.**

### **3. Hubungan dewan komisaris wanita dengan pengungkapan *intellectual capital*.**

Dewan komisaris adalah pemegang jabatan tertinggi dalam perusahaan sekaligus sebagai pengawas dari direksi. Keberadaan dewan komisaris terkait dengan gaya kepemimpinan. Keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh pemimpin organisasinya. Dalam hal ini gaya kepemimpinan sangat mempengaruhi motivasi karyawan. Terdapat perbedaan antara gaya kepemimpinan pria dan wanita. Keberadaan dewan komisaris wanita dianggap dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan pengungkapan atas *intellectual capital*, karena sifat wanita yang sangat berhati-hati dan teliti dalam mengambil keputusan dibandingkan pria (Kusumastuti *et al*, 2007).

Robbins (1996) dalam Kartikarini (2013) menyebutkan bahwa gaya kepemimpinan wanita cenderung lebih mengutamakan hubungan berkelanjutan daripada pencapaian material semata. Dewan komisaris wanita dapat memberikan perubahan dalam organisasi, dari struktur yang ketat melalui gaya kepemimpinannya yang luwes, kepercayaan, kerja tim,

maupun control. Wanita cenderung mendengarkan, memotivasi dan memberikan dukungan serta meleakukan tugas lebih baik daripada pria.

Saat ini, masih ada anggapan bahwa pria yang lebih pantas menduduki jabatan penting dalam perusahaan. Hal ini terjadi karena adanya pandangan yang berbeda tentang penyebab kesuksesan yang diraih pria dan wanita. Kesuksesan pria dianggap karena kemampuannya yang tinggi (dalam hal talenta atau kecerdasan), sedangkan kesuksesan wanita dianggap lebih disebabkan oleh faktor keberuntungan (Deaux & Ernswiller, dalam Crawford, 2006).

Dewan komisaris wanita juga dapat mengkomunikasikan kepada manajemen akan pentingnya melakukan praktik *intellectual capital disclosure* untuk menambah nilai perusahaan. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Kartikarini (2013) bahwa keberadaan wanita dalam dewan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan sukarela seperti *intellectual capital*. Oleh karena itu, peneliti berharap adanya pengaruh positif dewan komisaris wanita terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Berdasarkan kajian teoritis dan empiris, maka hipotesis 3 dalam penelitian ini adalah:

**H3: Dewan komisaris wanita berpengaruh positif terhadap pengungkapan *intellectual capital*.**

#### **4. Hubungan ukuran direksi dengan pengungkapan *intellectual capital*.**

Asumsi dalam teori agensi menyebutkan bahwa semakin besar ukuran direksi maka akan mengurangi masalah koordinasi dan

meningkatkan kemampuan dewan untuk melakukan tindakan strategis dalam pengambilan keputusan. Ukuran direksi yang lebih besar juga menawarkan peningkatan kapasitas pemantauan dalam menangani aktivitas perusahaan. Demikian pula, lebih banyak direksi dalam struktur dewan perusahaan bisa mengkompensasi kekurangan individu dalam keterampilan melalui pengambilan keputusan kolektif dewan.

Cerbioni & Parbonetti (2007) mendokumentasikan pengaruh negatif ukuran direksi terhadap pengungkapan *intellectual* secara keseluruhan. Selain itu, Abeysekera (2010) dan Hidalgo *et al.* (2011) keduanya menemukan pengaruh positif ukuran direksi terhadap internal capital taktis dan strategis pengungkapan *intellectual capital*. Abdul Rashid *et al.* (2012) juga mengamati hubungan positif yang signifikan ukuran direksi terhadap pengungkapan *intellectual capital* pada perusahaan IPO di Malaysia. Oleh karena itu, peneliti berharap adanya pengaruh positif ukuran direksi terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Berdasarkan kajian teoritis dan empiris, maka hipotesis 4 dalam penelitian ini adalah:

**H4: Ukuran direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan *intellectual capital*.**

#### **5. Hubungan rapat direksi dengan pengungkapan *intellectual capital*.**

Teori keagenan menyiratkan bahwa meskipun tujuan utama dari manajer (agen) adalah memaksimalkan kepentingan masing-masing, para manajer juga akan bertindak dengan berbagai cara untuk menyenangkan

para pemegang saham (prinsipal). Salah satu cara untuk membangun hubungan yang sehat dengan prinsipal adalah dengan menunjukkan komitmen anggota dewan melalui frekuensi rapat direksi dalam membahas masalah perusahaan. Frekuensi rapat direksi dapat menjadi bukti bahwa anggota dewan berkomitmen dan aktif dalam mengelola perusahaan (Khanchei, dalam Haji, A.A & Mohd Ghazali, 2013). Hal ini akan meningkatkan kapasitas pemantauan dan mengatasi masalah yang terjadi di dalam perusahaan.

Penelitian empiris sebelumnya tidak mempertimbangkan pengaruh rapat direksi terhadap pengungkapan sukarela. Namun, beberapa penelitian menguji pengaruh frekuensi rapat komite audit terhadap pengungkapan *intellectual capital* (Li *et al*, 2008; Taliyang dan Jusop, 2011). Kedua penelitian ini melaporkan pengaruh positif yang signifikan frekuensi rapat direksi dan tingkat pengungkapan *intellectual capital* di Inggris dan Malaysia. Oleh karena itu, peneliti berharap adanya pengaruh positif rapat direksi terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Berdasarkan kajian teoritis dan empiris, maka hipotesis 5 dalam penelitian ini adalah:

**H5: Rapat direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan *intellectual capital*.**

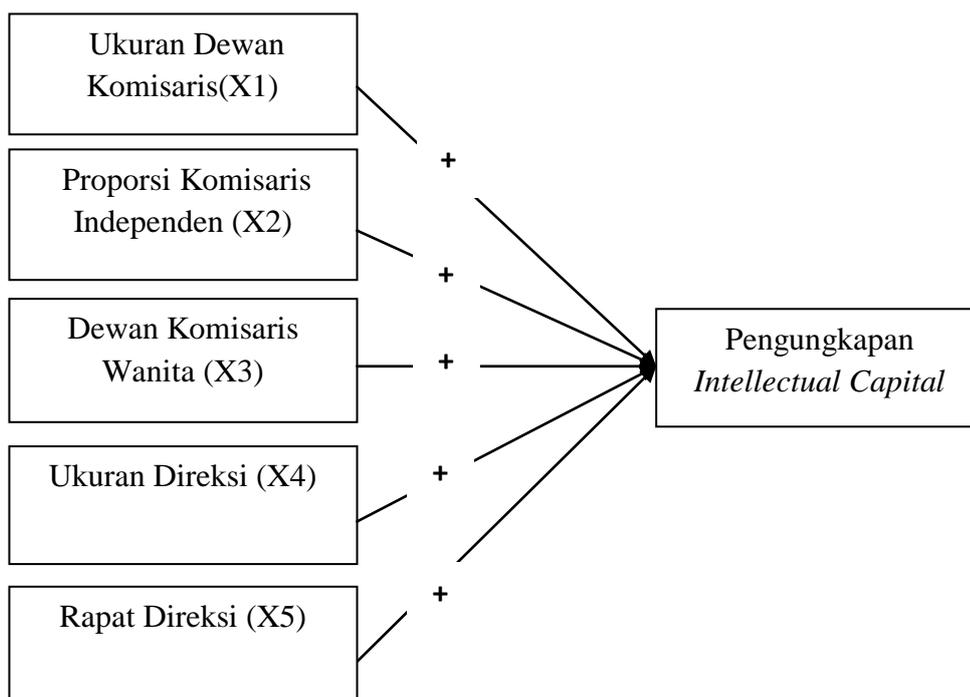
#### **D. Kerangka Konseptual**

Pelaporan keuangan tradisional tidak secara khusus mempertimbangkan pengungkapan informasi *intellectual capital* yang menggambarkan persentase signifikan dari nilai total perusahaan. Oleh

karena itu, banyak perusahaan berusaha memenuhi tuntutan para *stakeholder* untuk melengkapi pelaporan keuangan tradisional dengan informasi non-keuangan, termasuk informasi *intellectual capital*. Pengungkapan *intellectual capital* dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu atribut *corporate governance*. Atribut *corporate governance* penelitian ini diproksikan oleh variabel-variabel yang menjadi karakteristiknya.

Penelitian ini mengukur variabel dependen yaitu pengungkapan *intellectual capital* dan variabel independennya atribut *corporate governance* dengan memproksikannya menjadi 5 variabel, yaitu ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dewan komisaris wanita, ukuran direksi, dan rapat direksi. Dan variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah *listing age*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan.

**Gambar 2**  
**Kerangka Konseptual**



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh karakteristik dewan komisaris dan direksi terhadap pengungkapan *intellectual capital* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014 sampai tahun 2016. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang diajukan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :

1. Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *intellectual capital* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2014 - 2016
2. Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *intellectual capital* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2014 – 2016
3. Proporsi dewan komisaris wanita berpengaruh signifikan negatif terhadap luas pengungkapan *intellectual capital* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2014 - 2016
4. Ukuran direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *intellectual capital* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2014 - 2016

5. Rapat direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *intellectual capital* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2014 - 2016

## **B. Keterbatasan**

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang masih perlu revisi penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan terdapatnya unsur subjektivitas dalam menentukan indeks pengungkapan *intellectual capital*. Hal ini dikarenakan tidak adanya ketentuan baku yang dapat dijadikan acuan, sehingga penentuan indeks pengungkapan *intellectual capital* dapat berbeda untuk setiap peneliti.
2. Nilai *adjustedR-Square* dari penelitian ini yaitu sebesar 77,54% menunjukkan bahwa masih ada 22,46% variabel lain yang memiliki kontribusi dalam mempengaruhi luas pengungkapan *intellectual capital* pada laporan tahunan perusahaan.
3. Penelitian sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Keunggulan metode ini adalah peneliti dapat memilih sampel yang tepat, sehingga peneliti akan memperoleh data yang memenuhi kriteria untuk diuji. Namun, penggunaan metode *purposive sampling* berakibat pada kurangnya kemampuan generalisasi dari hasil penelitian.

### C. Saran

Berdasarkan keterbatasan yang ada pada penelitian ini, maka saran dari penelitian ini yaitu:

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan jumlah sampel yang lebih banyak dengan tahun pengamatan yang lebih panjang dalam penelitian-penelitian berikutnya.
2. Bagi penelitian selanjutnya yang tertarik untuk meneliti judul yang sama sebaiknya mempertimbangkan dan mencari variabel independen lain yang berpengaruh terhadap luas pengungkapan *intellectual capital*, seperti : komite audit dan konsentrasi kepemilikan.
3. Melakukan penelitian tidak hanya menggunakan sampel dari perusahaan perbankan tetapi dengan seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abeyssekera, I. 2007. Intellectual Capital Reporting Differences between A Developed and Developing Nation. *Journal of Intellectual Capital*, 8(2): 329-345.
- Abeyssekera, I. 2008. Motivation behind Human Capital Disclosure in Annual Reports. *Accounting Forum*, 32 (1): 1-13.
- Abeyssekera, I. 2010. The Influence of Board Size on Intellectual Capital Disclosure by Kenyan Listed Firms. *Journal of Intellectual Capital*, 11(4): 504–518.
- Abeyssekera, I., & Guthrie, J. 2005. An Empirical Investigation of Annual Reporting Trends of Intellectual Capital in Srilanka. *Critical Perspective on Accounting*, 16: (1): 151-163.
- Achmad, T. 2012. Dewan Komisaris dan Transparansi: Teori Keagenan atau Teori Stewardship?. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 16(1): 1-12.
- Allegrini, M., & Greco, G. 2011. Corporate Boards, Audit Committees and Voluntary Disclosure: Evidence from Italian Listed Companies. *Journal of Management and Governance*, 17 (1): 187-216.
- An, Y., Davey, H. & Eggleton, I.R.C. 2011. Towards a comprehensive theoretical framework for voluntary IC disclosure. *Journal of Intellectual Capital*, 12 (4): 571-585.
- Arifah, Dista. 2012. Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Intellectual Capital: Pada Perusahaan Ic Intensive. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 9 (2): 189-211.
- Bontis, N., William, C. C. L., & Richardson, R. 2000. Intellectual Capital and Business Performance in Malaysian Industries. *Journal of Intellectual Capital*, 1(1): 85-100.
- Bukh, P., 2003. A Paradox. The Relevance of Intellectual Capital Disclosure. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 16: 49-56.
- Cerbioni, F. & Parbonetti, A. 2007. Exploring the effects of corporate governance on intellectual capital disclosure: an analysis of European biotechnology companies. *European Accounting Review*, 16 (4): 791-826.
- FCGI. 2001. *Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)*. Edisi ke-2: Jakarta.

- Goh, P.C. & Lim, K.P. 2004. Disclosing intellectual capital in company annual reports: evidence from Malaysia. *Journal of Intellectual Capital*, 5 (3): 500-510.
- Guthrie, J, Petty & Yongvanich, K. 2004. Using content analysis as a Research Method to Inquire Into Intellectual Capital Reporting. *Journal of Intellectual Capital*, 5 (2): 282-293.
- Guthrie, J., P. Richard & F. Ricceri. 2006. The voluntary reporting of intellectual capital: comparing evidence from Hong Kong and Australia. *Journal of Intellectual Capital*, 7 (2).
- Haji, A.A. & Ghazali, Mohd. 2012. Intellectual capital disclosure trends: some Malaysian evidence. *Journal of Intellectual Capital*, 13 (3).
- Haji, A.A & Ghazali, Mohd. 2013. A Longitudinal Examination of Intellectual Capital Disclosure and Corporate Governance Attributes in Malaysia. *Asian Review Of Accounting*, 21: 27-52.
- Hidalgo, R. L., Emma G. M. & Isabel M. 2011. Corporate Governance and Intellectual Capital Disclosure. *Journal of Business Ethics*, 100: 483-495.
- Holland, J. 2006. Fund management, intellectual capital, intangibles and private disclosure. *Managerial Finance*, 32(4).
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2010. *Aktiva Tidak Berwujud (Revisi 2010)*, PSAK No. 19.
- Jensen, M.C. & Meckling, W.H. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3: 303-360.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta.
- Li, J. R. Pike, & R. Haniffa. 2008. Intellectual capital Disclosure and Corporate Governance Structure in UK Firms. *Accounting and Business Research*, 38 (2): 137-159
- Mohd Ghazali, N. A., & Weetman, P. 2006. Perpetuating Traditional Influences: Voluntary Disclosure in Malaysia Following The Economic Crisis. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 15: 226-248.
- Nugroho, Ahmadi. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Intellectual Capital Disclosure. *Accounting Analysis Journal*. Universitas Negeri Semarang.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 *Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik*. Jakarta

- Purnomosidhi, Bambang. 2006. Praktik Pengungkapan Intellectual capital pada Perusahaan Publik DI BEJ. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 9 (1): 1-20.
- Putri, I.N & Chairiri. 2016. Antecedent dan Konsekuensi Intellectual Capital Disclosure. *Simposium Nasion Akuntansi XIX*. Lampung.
- Santoso, Setyarini. 2012. Pengaruh Modal Intelektual dan Pengungkapannya Terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 14.
- Shiddiq, N.R. & Ningrum, N.R. 2013. Analisis Pengaruh Intellectual Capital dan Good Corporate Governance terhadap Financial Performance. *Diponegoro Journal of Accountin*, 1 (2).
- Singh, I. & Zahn, V.J. 2008. Determinants of intellectual capital disclosure in prospectuses of initial public offerings. *Accounting and Business Research*, 38 (5): 409-431.
- Suhardjanto, D. & Wardhani M. 2010. Praktik Intellectual Capital Disclosure Perusahaan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *JAAI*, 14 (1): 71-85
- Sveiby, K.E. 1997. *The New organization wealth: Managing and Measuring Knowledge-based Assets*. San Fransisco, CA: Berret-Koehler Publishers.
- Taliyang, S.M, & Jusop, M. 2011. Intellectual Capital Disclosure and Corporate Governance Sturcture: Evidence in Malaysia. *International Journal of Business and Management*, 6(2): 109-117.
- Uzliawati, Lia. 2015. Dewan Komisaris dan Intellectual Capital Disclosure Pada Perbankan di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 19 (2): 226-234.
- Wardhani, M. & Suhardjanto, D. 2010. Praktik Intellectual Capital Disclosure Perusahaan yang terdaftar di BEI. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 14(1): 71-85.
- Waryanto. 2010. Pengaruh Karakteristik Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia. *Skripsi*. Universitas Diponegoro
- Whiting, R.H. & Miller, J.C. 2008. Voluntary disclosure of intellectual capital in New Zealand annual reports and the 'hidden value'. *Journal of Human Resource Costing & Accounting*, 12(1): 26-50.
- Zulkarnaen, E.I., & A. Mahmud. 2013. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Luas Pengungkapan Intellectual Capital. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 5(1).